



**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KORUPSI
INDONESIA TAHUN 1985 – 2016**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Feni Ambarwati

NIM 7111415006

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Pada : Rabu

Tanggal: 08 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Fafurida, S.E.,M.Sc.

NIP.198502162008122004

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Lesta', is written over a horizontal line.

Lesta Karolina Br. Sebayang, S.E.,M.Si

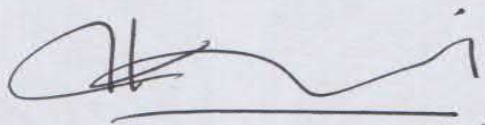
NIP.198007172008012016

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

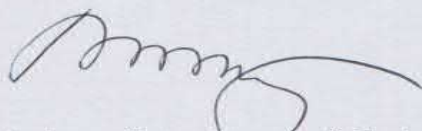
Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2019

Penguji I



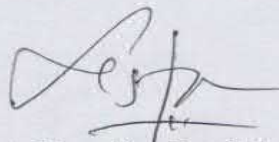
Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si
NIP.196908212006042001

Penguji II



Andryan Setyadharma, S.E., M.Si, Ph.D
NIP. 197901022008121003

Penguji III




Lesta Karolina Br. Sebayang, S.E., M.Si
NIP.198007172008012016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Heri Yanto, MBA., PhD
NIP.196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feni Ambarwati

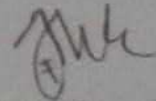
NIM : 7111415006

Tempat Tanggal Lahir : 01 Desember 1997

Alamat : Desa Sibalung RT 04 RW 01 Kec. Kemranjen Kab.
Banyumas

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, April 2019



Feni Ambarwati

NIM 7111415006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ Jangan pernah putus asa dalam menghadapi rintangan hidup ini, karena sesungguhnya kesulitan beserta dengan kemudahan. (Qs Al- insyiroh ayat 5-6).
- ❖ Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasib yang ada pada dirinya. (Qs. Ar – Ra'd Ayat 11)
- ❖ Sebaik – baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. (Hr. Bukhari Muslim)
- ❖ Setiap orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, dan semua waktu saat belajar. (Saptuari Sugiarto)

Persembahan

- Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesabaran dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Determinan Tingkat Korupsi Di Indonesia Tahun 1985 - 2016**” dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figure teladan dalam menjalani kehidupan ini sehingga senantiasa dapat hidup dalam keridhoannya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini dalam proses penyusunannya mengalami banyak kesulitan dan hambatan. Namun berkat rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, karena penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan serta kemudahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA, Phd. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang membantu kelancaran perkuliahan selama ini.
3. Fafurida, S.E, M.Sc., Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang membantu kelancaran kegiatan perkuliahan selama ini.
4. Lesta Karolina Br Sebayang, S.E., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu tercinta serta adikku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara material dan spiritual untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman ekonomi pembangunan angkatan 2015, yang selalu memotivasi. Semoga persaudaraan kita akan abadi.
7. Teman – teman Kos Wisma Kartini (Istin, Septi, Fina, Reni, Ayu, Agustin, Dian) terimakasih atas dukungan kalian selama ini.
8. Teman dekatku Wahyu Bagus Istianto yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya, kepada Allah SWT-lah penulis memohon ampun atas segala kekurangan yang penulis lakukan dan berhadap semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Semarang,

Feni Ambarwati
NIM 7111415006

ABSTRAK

Ambarwati Feni. 2019. *Analisis Determinan Tingkat Korupsi Di Indonesia Tahun 1985 – 2016*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Lesta Karolina Br Sebayang, S.E., M.Si.

Kata Kunci : Korupsi, Pendapatan Per Kapita, Keterbukaan Ekonomi, Anggaran Publik.

Korupsi masih menjadi masalah besar bagi negara- negara di dunia termasuk negara Indonesia. Tingkat korupsi Indonesia masih tergolong tinggi dan stagnan. Berdasarkan pengukuran dari *International Country Risk Guide*, tingkat korupsi Indonesia cenderung stagnan. Peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah dan di bawah negara Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia hanya unggul dari negara Filipina, Vietnam, dan Laos. Oleh karena itu, perlu dicari solusi untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, keterbukaan ekonomi, dan anggaran publik terhadap tingkat korupsi di Indonesia tahun 1985 – 2016. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu (*time series*) selama 32 tahun dari tahun 1985 – 2016. Variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan per kapita (X_1), keterbukaan ekonomi (X_2), anggaran publik (X_3) dan tingkat korupsi (Y). Data dianalisis menggunakan analisis kuantitatif *Error Correction Model* (ECM) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan jangka panjang diantara variabel – variabel yang dianalisa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber diantaranya *International Country Risk Guide*, *World Bank*, dan Kementerian Keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Sedangkan keterbukaan ekonomi, anggaran publik tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi Indonesia. Dalam jangka panjang pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi Indonesia, keterbukaan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi Indonesia. Anggaran publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini meningkatnya pendapatan per kapita maka mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Meningkatnya keterbukaan ekonomi maka mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, dan meningkatnya anggaran publik maka dapat meningkatkan tingkat korupsi Indonesia. Saran yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pemerintah hendaknya memperketat peraturan pemberantasan tindak korupsi.

ABSTRACT

Ambarwati, Feni. 2019. The Analysis of Corruption Rate Determinants in Indonesia 1985 - 2016. Final Project, Development Economics, Faculty of Economy, Universitas Negeri Semarang. Adviser Lesta Karolina Br Sebayang, S.E., M.Si.

Keywords: Corruption, GDP Per Capita, Economic Openness, Public Budget.

Corruption is still a major problem for countries in the world including Indonesia. The corruption level in Indonesia is still high. Based on the measurement from the International Country Risk Guide, The corruption level in Indonesia tends to decline. However, the corruption perception index rank of Indonesia is still low and under Singapore, Malaysia, Thailand. Indonesia is only superior to the Philippines, Vietnam, and Laos. Therefore, a solution is needed to reduce the corruption level in Indonesia.

The purpose of this study is to analyze the effect of GDP per capita, economic openness, and public budget on the level of corruption in Indonesia in 1985 - 2016. This study used time series data for 32 years from 1985 - 2016. Variables in the study this is GDP Per Capita (X1), economic openness (X2), public budget (X3) and corruption level (Y). Data were analyzed using the Error Correction Model (ECM) quantitative analysis which aimed to determine short-term and long-term relationships between the variables analyzed. The data used in this study were obtained from various sources including the International Country Risk Guide, the World Bank, and the Ministry of Finance.

The results of this study indicate that in short term GDP Per Capita has a positive and significant effect on the corruption level in Indonesia. Meanwhile, economic openness and the public budget do not affect the corruption level in Indonesia. In the long run GDP Per Capita has a positive and significant effect on the corruption level in Indonesia. Economic openness has a positive and significant effect on the corruption level in Indonesia. Public budgets have a negative and significant effect on the corruption level in Indonesia.

This study concludes that increasing per capita income reduces the corruption level in Indonesia. Increasing the openness of the economy, reducing the level of corruption in Indonesia, and increasing public budgets can increase the corruption level in Indonesia. The suggestion relating to this research is that the government should tighten regulations to eradicate corruption.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
1.5 Orisinalitas.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Landasan Teori	22
2.1.1 Game Theory.....	22
2.1.2 Teori Korupsi	27
2.1.3 Pendapatan Per Kapita	28
2.1.4 Keterbukaan Ekonomi.....	32
2.1.5 Anggaran Publik	34
2.2 Hubungan Pendapatan Per Kapita Dan Tingkat Korupsi	35
2.3 Hubungan Keterbukaan Ekonomi Dan Tingkat Korupsi	37

2.4	Hubungan Anggaran Publik Dan Tingkat Korupsi	38
2.5	Penelitian Terdahulu.....	40
2.5.1	Perbedaan Dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu	43
2.6	Kerangka Berpikir	46
2.7	Hipotesis Penelitian.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....		48
3.2	Jenis Dan Sumber Data	48
3.3	Variabel Penelitian	49
3.3.1	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	49
3.4	Teknik Pengumpulan Data	51
3.5	Metode Analisis Data	51
3.6	Pendekatan Model Koreksi Kesalahan.....	52
3.6.1	Uji Akar Unit (Unit Root Test).....	52
3.6.2	Uji Kointegrasi	53
3.6.3	Error Correction Model (ECM)	53
3.6.4	Uji Statistik	54
3.6.4.1	Uji t Statistik.....	54
3.6.4.2	Uji F Statistik.....	55
3.6.4.3	Koefisien Adjusted R ²	56
3.6.5	Uji Asumsi Klasik.....	57
3.6.5.1	Uji Normalitas	57
3.6.5.2	Uji Multikolinearitas	57
3.6.5.3	Uji Heterokedastisitas	58
3.6.5.4	Uji Autokorelasi	59
BAB IV HASIL DAN KESIMPULAN		60
4.1	Gambaran Umum	60
4.1.1	Perkembangan Tingkat Korupsi Indonesia	60
4.1.2	Perkembangan Pendapatan Per Kapita Indonesia.....	63

4.1.3	Perkembangan Keterbukaan Ekonomi Indonesia	68
4.1.4	Perkembangan Anggaran Publik Indonesia	71
4.2	Hasil Analisis Data	73
4.2.1.	Pemilihan Model	73
4.2.2.	Uji Unit Root/ Uji Stasioneritas Data.....	74
4.2.3.	Uji Kointegritas	76
4.2.4.	Hasil Error Correction Model (ECM).....	76
4.2.5.	Uji Statistik	78
4.2.5.1.	Uji t Statistik	78
4.2.5.2.	Uji F Statistik.....	81
4.2.5.3.	Uji Adjusted R ²	82
4.2.6.	Uji Asumsi Klasik.....	84
4.2.6.1.	Uji Normalitas.....	84
4.2.6.2.	Uji Multikolinearitas.....	85
4.2.6.3.	Uji Heterokedstisitas	86
4.2.6.4.	Uji Autokorelasi.....	87
4.3	Pembahasan	89
4.3.1.	Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Tingkat Korupsi Indonesia	89
4.3.2.	Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Tingkat Korupsi Indonesia...	91
4.3.3.	Pengaruh Anggaran Publik Terhadap Tingkat Korupsi Indonesia	92
BAB V PENUTUP.....		94
5.1	Kesimpulan.....	94
5.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN.....		101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Beberapa Negara ASEAN Tahun 2012-2016.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga Dan Sektor Tahun 2016	7
Tabel 1.3 Data Perkara Tindak Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2012 – 2016....	9
Tabel 2.1 Matriks <i>Pay Off</i> Dari Teori Permainan Oleh Tsebelis Tahun 1968.....	23
Tabel 2.2 Matriks <i>Pay Off</i> Oleh Pradiptyo.....	25
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Hasil Uji Unit Root Augmented Dickey Fuller	75
Tabel 4.2 Hasil Uji Kointegrasi Dengan Metode Eagle Granger.....	76
Tabel 4.3 Hasil Regresi Model Jangka Pendek.....	77
Tabel 4.4 Hasil Regresi Persamaan Jangka Pendek.....	79
Tabel 4.5 Hasil Regresi Persamaan Jangka Panjang.....	80
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Jangka Pendek	85
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Jangka Panjang	85
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	87
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 1985- 2016.....	5
Gambar 1.2: Pendapatan Per Kapita Indonesia Tahun 1985 - 2016	13
Gambar 1.3: Keterbukaan Ekonomi Indonesia Tahun 1985 - 2016.....	15
Gambar 1.4: Anggaran Publik Indonesia Tahun 1985- 2016	17
Gambar 2.1: Kerangka Berpikir.....	46
Gambar 4.1: Perkembangan Tingkat Korupsi Indonesia Tahun 1985 -2016.....	60
Gambar 4.2: Perkembangan Pendapatan Per Kapita Indonesia Tahun 1985-2016	65
Gambar 4.3: Perkembangan Keterbukaan Ekonomi Indonesia Tahun 1985-2016.....	69
Gambar 4.4: Perkembangan Anggaran Publik Indonesia Tahun 1985-2016.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Data CPI, PDB Per Kapita, Keterbukaan Ekonomi, Anggaran Publik	102
LAMPIRAN 2 Uji Mackinnon, White Dan Davidson.....	103
LAMPIRAN 3 Uji Akar Unit/ Stasioneritas Data.....	104
LAMPIRAN 4 Uji Kointegrasi	107
LAMPIRAN 5 Hasil Regresi	108
LAMPIRAN 6 Uji Asumsi Klasik	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan wewenang guna untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Transparency International, (2017) mendefinisikan bahwa korupsi pada sektor publik merupakan suatu tindakan penyelewengan terhadap jabatan yang diperoleh guna untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu, menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengungkapkan bahwa korupsi sebagai suatu tindakan kejahatan yang melawan hukum dan dilakukan oleh setiap orang yang memiliki jabatan serta melakukan penyelewengan terhadap jabatan tersebut guna untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dimana hal itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda uang paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak sebesar 1 miliar.

Korupsi adalah tindak kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa bukan hanya karena modus dan tekniknya yang sistematis tetapi dampak dari korupsi tersebut juga sangat besar dan bersifat paralel serta merusak seluruh sistem kehidupan yaitu, sistem kehidupan dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dari aspek ekonomi, korupsi dapat menyebabkan kerugian Negara yang sangat besar sehingga

dapat mengganggu perekonomian Negara serta dapat menyebabkan kesenjangan yang tinggi antar masyarakat. Oleh sebab itu, korupsi harus mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak yang lebih meluas lagi (Junaidi, 2017).

Fenomena korupsi sudah meluas di berbagai negara di dunia. Korupsi merupakan suatu masalah besar dan sebagian besar. Negara di dunia baik Negara berkembang maupun Negara – Negara dengan perekonomian pesat sekalipun juga mengalami masalah korupsi. Praktik korupsi yang sering terjadi baik di Negara maju maupun Negara berkembang hampir sama, kasus – kasus tersebut diantaranya yaitu penggelapan uang, penyogokan dan penyalahgunaan jabatan (Hariyani, 2016). Selain itu, semua Negara memiliki kasus – kasus korupsi yang sudah berjalan sangat lama bahkan bertahun – tahun dan belum semua teratasi dengan baik, maka untuk mengurangi adanya permasalahan korupsi di setiap Negara perlu dibentuk suatu organisasi non pemerintah yang bekerja untuk memberantas korupsi baik dari kalangan masyarakat, pemerintah, dan komunitas bisnis.

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang di Asia yang memiliki sejarah panjang korupsi. Pada masa penjajahan belanda, korupsi sudah merajalela di Indonesia yang ditandai dengan dibubarkannya VOC karena banyak anggota dari VOC yang melakukan korupsi (Rahayu, 2005 dalam Franciari, 2012). Pada masa pemerintahan orde lama, keadaan korupsi di Indonesia masih tinggi sehingga disahkan “Undang – Undang Keadaan Bahaya” pada awal tahun 60an yang melahirkan lembaga pemberantas tindak korupsi yang bernama PARAN (Panitia

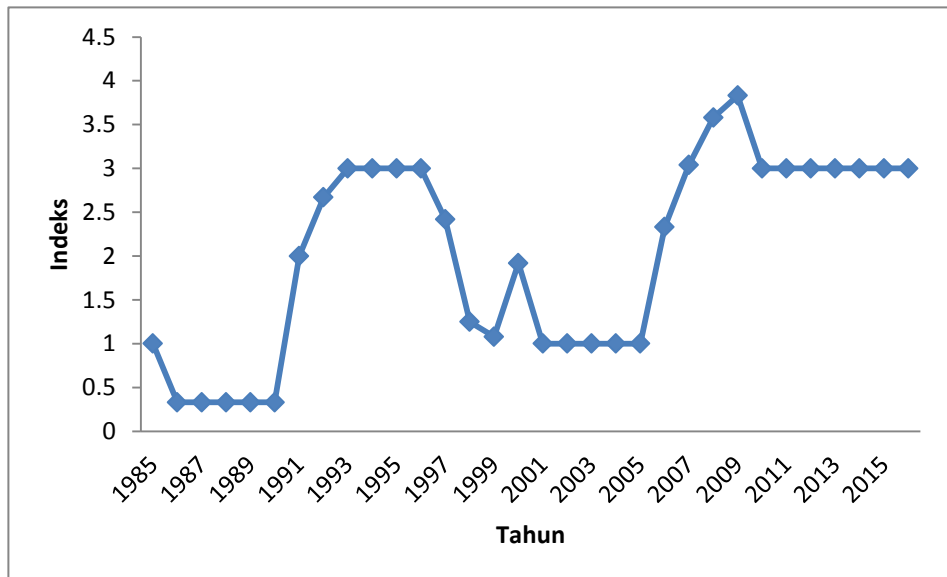
Retooling Aparatur Negara). Dimana, point penting dalam PARAN tersebut adalah bahwa setiap pejabat negara wajib melaporkan daftar kekayaan yang dimiliki. Namun, PARAN tidak efektif dalam memberantas korupsi yang disebabkan oleh tidak adanya komitmen pejabat negara untuk memberantas korupsi. Selanjutnya dibentuk kebijakan baru untuk menggantikan PARAN, dengan mengesahkan Keppres No.275 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Korupsi dengan dibentuk lembaga Operasi Budhi dengan sasaran untuk memberantas korupsi pada perusahaan – perusahaan negara atau lembaga negara seperti BUMN, Pertamina. Namun, lembaga Operasi Budhi tidak efektif untuk mengurangi tingkat korupsi disebabkan oleh adanya resistensi birokrasi dan banyak pejabat negara yang kerjasama dan dekat dengan presiden (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017).

Pada masa pemerintahan orde baru tindak kejahatan korupsi di Indonesia semakin parah sebab tindak kejahatan korupsi tersebut sudah masuk ke semua lini kehidupan dan pemerintahan. Pemberantasan korupsi pada era orde baru hanya sebuah janji politik saja. Ditandai dengan pidato presiden Soeharto di depan DPR/MPR pada tanggal 16 Agustus 1967 yang mengemukakan akan membasmi korupsi hingga akar – akarnya dengan dibentuknya lembaga TPK (Tim Pemberantasan Korupsi). Namun, TPK tidak berhasil mengurangi tingkat korupsi disebabkan karena tidak adanya keberanian untuk melawan korupsi yang sudah mewabah terutama di perusahaan dan lembaga negara seperti Pertamina, Bulog, dan Departemen Kehutanan. Ketidakberhasilan ini menyebabkan terjadinya demonstrasi mahasiswa secara besar – besaran pada tahun 1970. Selanjutnya dibentuk lembaga

Komite Empat dan Operasi Tertib. Akan tetapi, sama halnya dengan TPK lembaga tersebut gagal memberantas korupsi yang disebabkan oleh lahirnya peraturan perundang – undangan yang sengaja melindungi tipikor dari jeratan hukum. Para tindak perkara korupsi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah serta dapat membeli peraturan dan penegakan hukum untuk melindungi dan melancarkan usahanya dengan membayar suap (Ackerman, 1996).

Pada masa reformasi pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan lebih serius dan secara mendasar oleh pemerintah. Berbagai lembaga anti korupsi serta peraturan perundangan dibentuk untuk mendukung keberhasilan dalam memerangi korupsi. Pada era ini, tingkat korupsi Indonesia mulai berkurang sebab pada masa ini telah dibentuk lembaga anti korupsi melalui Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adanya komitmen dan kerja keras dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta adanya dukungan dari semua elemen bangsa untuk memerangi korupsi, sehingga mampu mengurangi tingkat korupsi di Indonesia (Suraji, 2008).

International Country Risk Guide dikenal sebagai organisasi yang memberikan kontribusi dalam pergerakan pemberantasan korupsi di dunia dan mengeluarkan *corruption perception index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi sebagai *proxy* atau ukuran untuk mengukur tingkat korupsi di dunia yaitu dengan ukuran skala 0-5 yang mana semakin mendekati 0 maka sangat korup dan semakin mendekati 5 maka bersih dari korupsi. Berdasarkan pengukuran dari *International Country Risk Guide* nilai indeks persepsi korupsi Indonesia cenderung meningkat.



Gambar 1.1 : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 1985- 2016

Sumber: *International Country Risk Guide*, 2017

Berdasarkan data pada gambar 1.1 ditunjukkan nilai indeks persepsi korupsi Indonesia periode tahun 1985-2016, dapat dipahami bahwa nilai indeks persepsi korupsi Indonesia cenderung meningkat yaitu pada tahun 1985 sebesar 1, pada tahun 1986 sebesar 0,3, pada tahun 1987 sebesar 0,3, hingga tahun 2016 nilai indeks persepsi Indonesia sebesar 3, maka apabila dilihat dari nilai indeks persepsi korupsi, tingkat korupsi Indonesia cenderung mulai menunjukkan keadaan yang membaik. Selain pengukuran dari *International Country Risk Guide* terdapat pengukuran indeks persepsi korupsi dari *Transparency International*. Apabila dilihat dari peringkat indeks persepsi korupsi hasil pengukuran *Transparency International* menunjukkan bahwa peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia masih tergolong rendah sedangkan Singapura merupakan negara dengan peringkat indeks persepsi korupsi tertinggi diantara negara – negara di Asia Tenggara.

Tabel 1.1**Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Beberapa Negara ASEAN Tahun 2012-2016**

Tahun	Singapura	Indonesia	Malaysia	Thailand	Filipina	Vietnam	Laos	n
2012	5	118	54	88	105	123	160	176
2013	5	114	53	102	94	116	140	177
2014	7	107	51	85	85	119	145	175
2015	7	88	54	76	95	111	139	168
2016	7	90	55	101	101	113	123	176

n: Jumlah Negara Yang Disurvey

Sumber: Transparency International, 2017

Berdasarkan peringkat indeks persepsi korupsi tahun 2012-2016 negara-negara di kawasan ASEAN (*Association Of South East Asian Nations*) seperti yang tertera pada tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa peringkat indeks persepsi korupsi negara – negara di kawasan ASEAN memiliki perkembangan yang berfluktuatif dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016. Semua negara memiliki tren perkembangan peringkat indeks persepsi korupsi yang berfluktuatif, seperti halnya negara Indonesia memiliki peringkat indeks korupsi yang masih rendah dan di bawah negara Singapura, Malaysia, Thailand. Indonesia hanya unggul dari negara Filipina, Vietnam, dan Laos, yang mana hal ini menandakan bahwa tingkat korupsi Indonesia masih tergolong tinggi.

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia disebabkan karena masih banyaknya pejabat publik yang terjerat kasus korupsi serta masih banyak kasus korupsi di Indonesia yang belum terselesaikan dengan tuntas. Sebagian besar pejabat publik

yang terjerat kasus korupsi merupakan pejabat publik di pemerintahan daerah. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, (2017) mencatat bahwa kasus – kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2016 terdapat 482 kasus korupsi, 1101 tersangka serta Negara mengalami kerugian sebesar 1,450 triliun, dimana kasus korupsi tersebut berkembang pada lembaga dan sektor di Indonesia.

Tabel 1.2

Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga Dan Sektor Tahun 2016

No.	Berdasarkan Lembaga	Jumlah Kasus	Berdasarkan Sektor	Jumlah Kasus
1	Pemerintah kabupaten	222	Anggaran desa	98
2	Pemerintah desa	106	Pemerintahan	55
3	Pemerintah kota	45	Pendidikan	53
4	BUMN	23	Transportasi	52
5	Kementrian	19	Sosial kemasyarakatan	40

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2017

Pada data dalam tabel 1.2 ditunjukkan jumlah kasus korupsi berdasarkan lembaga dan sektor tahun 2016, dapat dipahami bahwa kasus korupsi tertinggi terdapat pada lembaga pemerintah kabupaten dan sektor anggaran desa. Sejalan dengan diterapkannya desentralisasi fiskal di Indonesia, dimana setiap pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur daerahnya. Tingginya derajat desentralisasi fiskal menandakan makin leluasa pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur keuangan daerah. Apabila tidak diimbangi dengan adanya aturan yang tegas serta adanya kontrol dari lembaga lain yang berwenang maka dapat memicu munculnya resiko korupsi yang semakin kuat di daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena birokrat

lokal masih lemah serta lemahnya administrasi di tingkat daerah. Saat desentralisasi tidak dipersiapkan dengan matang dan kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat maka cenderung meningkatkan tindak korupsi (Suprayitno, 2011).

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya disebabkan karena adanya desentralisasi fiskal melainkan di Indonesia masih terdapat beberapa kasus korupsi yang belum diberantas tuntas, seperti kasus Bank Century, kasus dana haji kemenag 2011 – 2013, kasus suap kementerian ESDM 2013, kasus korupsi proyek hambalang, kasus suap PON Riau 2012, kasus korupsi wisma atlet Palembang, kasus korupsi pelindo II, kasus korupsi SKL BLBI, kasus korupsi pesawat garuda 2005 – 2014, kasus korupsi pajak (Indonesia Corruption Watch, 2017). Kasus korupsi tersebut sampai saat ini belum dapat diatasi, sulitnya memberantas korupsi di Indonesia disebabkan karena perencanaan dan pelayanan publik yang masih lemah sedangkan dalam pemberantasan korupsi harus didukung oleh pemerintah dan lembaga publik tidak hanya mengandalkan KPK saja serta dibutuhkan juga peran masyarakat melalui pelaporan masyarakat mengenai adanya indikasi korupsi.

Tabel 1.3*Data Perkara Tindak Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2012 – 2016*

Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Pemerintah pusat	18	26	18	16	29	107
Jawa	10	29	20	6	44	104
Sumatera	15	12	8	24	20	79
Sulawesi	5	1	2	2	2	12
Maluku	0	0	0	0	1	1
Kalimantan	0	0	0	0	0	0
Bali	0	0	2	2	0	4
Papua	0	0	4	7	0	11
Kepulauan sunda kecil	0	2	4	0	3	9

Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017)

Berdasarkan pada tabel 1.2 ditunjukkan angka tindak perkara korupsi dalam kurun waktu 2012 – 2016 berdasarkan wilayah di Indonesia. Pada pemerintahan pusat terdapat 107 perkara tindak korupsi. Sedangkan di tingkat daerah perkara tindak korupsi tertinggi adalah Pulau Jawa yaitu sebesar 104 kasus korupsi, Pulau Sumatera sebesar 79 perkara tindak korupsi, Pulau Sulawesi sebesar 12 perkara tindak korupsi, Maluku sebesar 1 perkara tindak korupsi, Bali sebesar 4 perkara tindak korupsi, Papua sebesar 11 perkara tindak korupsi, dan Kepulauan Sunda Kecil sebesar 9 perkara tindak korupsi. Sedangkan pulau Kalimantan merupakan daerah dengan jumlah perkara tindak korupsi paling rendah sepanjang tahun 2016 dengan jumlah perkara 0 tindak perkara korupsi. Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa perkara tindak korupsi Indonesia sudah meluas sampai pemerintahan daerah.

Aspek kelembagaan yang masih rendah dan kurang berkualitas mengakibatkan tingkat korupsi Indonesia masih tinggi dan tersebar di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Etika berinstitusi Indonesia yang masih rendah sehingga menyebabkan kualitas institusi di Indonesia masih harus ditingkatkan. Hal ini, dibuktikan masih banyaknya praktek suap dan korupsi serta birokrasi masih rumit. Hal tersebut, mendasari masih banyaknya masyarakat yang menderita keterbelakangan dan ketertinggalan. Kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan lancar serta menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi pembangunan dari pembangunan fisik menjadi pembangunan kelembagaan. Fokus pembangunan hanya pada upaya pemberantasan korupsi dan membenahi kelembagaan yang belum efektif. Sedangkan tujuan utama pembangunan yaitu meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai dengan maksimal.

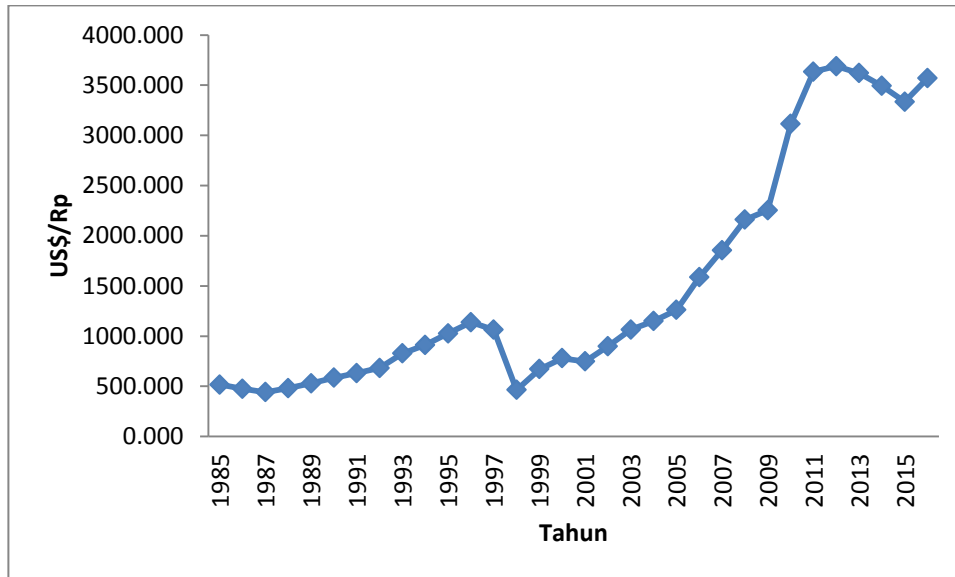
Selain kualitas institusi yang masih rendah yang dapat memicu banyaknya praktek suap dan korupsi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi korupsi yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar yaitu faktor ekonomi, faktor politik sosial budaya. Faktor politik diantaranya yaitu pemerintah dan desentralisasi, demokrasi, faktor sosial budaya meliputi sejarah korupsi, warisan kolonial, dan kualitas regulasi. Sedangkan faktor ekonomi meliputi pendapatan masyarakat, keterbukaan ekonomi, dan besarnya anggaran publik serta negara dengan kekayaan sumber alam yang besar secara signifikan lebih korup karena adanya kesempatan yang tinggi (Ades dan Di Tella, 1999). Menurut Kaufmann dan Kray, 2002

mengungkapkan bahwa faktor ekonomi sering dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi korupsi.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 258.383.256 juta jiwa, pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 261.554.226 juta jiwa. Sedangkan angka ketergantungan Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun, angka ketergantungan tersebut masih tergolong tinggi. Pada tahun 2015 angka ketergantungan Indonesia sebesar 49,15% hingga tahun 2016 angka ketergantungan Indonesia sebesar 49,32% yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 50 jiwa penduduk non produktif.

Selain itu, hal ini diimbangi juga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahun 2015 sebesar 860.854,24 miliar mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 932.256,50 miliar. Peningkatan tersebut dipicu oleh adanya peningkatan kegiatan perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir. Kegiatan ekspor impor Indonesia meningkat menyebabkan nilai ekspor neto Indonesia meningkat yaitu pada tahun 2015 sebesar 3.294.000 miliar meningkat hingga tahun 2016 menjadi sebesar 7.486.000 miliar yang artinya bahwa keterbukaan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan. Selain itu, peningkatan pada perekonomian mengakibatkan peningkatan pada anggaran sektor publik (BPS, 2017).

Peningkatan tersebut mengakibatkan pendapatan per kapita Indonesia cenderung mengalami sedikit peningkatan. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat serta menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Maka dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan masyarakat dapat menjalankan kehidupan yang produktif. Disisi lain, hal ini juga harus diimbangi dengan perbaikan sistem kelembagaan. Perbaikan sistem kelembagaan dari segi ekonomi, politik, sosial budaya yang dapat ditinjau dari adanya perbaikan pada aspek aturan main baik formal maupun informal serta aspek organisasi yang menjalankan aturan main tersebut. Apabila tidak diimbangi dengan perbaikan pada tatanan kelembagaan maka dapat memicu kesempatan untuk melakukan korupsi (Wijayanto, 2009). Namun, adanya peningkatan pada pendapatan per kapita dapat menurunkan tingkat korupsi karena adanya ketersediaan modal untuk memberantas korupsi sebab upaya pemberantasan korupsi memerlukan biaya yang tinggi (Pradiptyo, 2007). Selain itu, kesejahteraan masyarakat yang tinggi, pendidikan masyarakat yang tinggi serta angka melek huruf yang tinggi akan menciptakan penegakkan hukum yang berkualitas (Elbahnasawy, 2012 dalam Yugo, 2016). Menurut Saha dan Ben Ali, 2017 mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita yang meningkat dapat menurunkan tingkat korupsi sebab negara akan memiliki modal atau biaya yang tinggi untuk memberantas korupsi. Sedangkan menurut Treisman, 2017 hasil penelitiannya menunjukkan terdapat hubungan negatif antara pendapatan per kapita dan korupsi. Berikut merupakan perkembangan pendapatan per kapita di indonesia dari tahun 1985 – 2016:



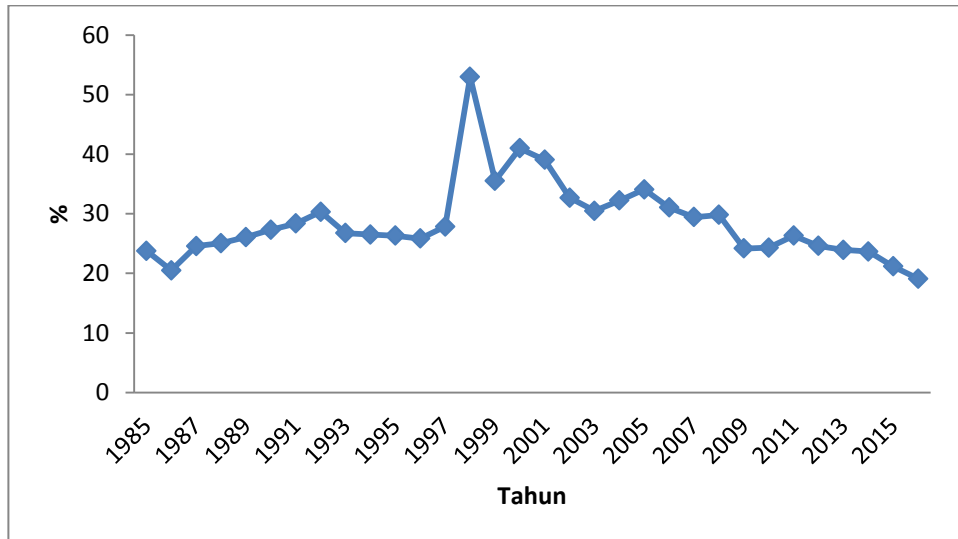
Gambar 1.2: Pendapatan Per Kapita Indonesia Tahun 1985 - 2016

Sumber: World Bank, 2017

Berdasarkan data pada gambar 1.2, dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita di Indonesia memiliki nilai yang cukup berfluktuatif dan cenderung meningkat. Tahun 1985 pendapatan per kapita Indonesia sebesar US\$ 516,868, pada tahun 1986 sebesar US\$ 474,781, pada tahun 1987 sebesar US\$ 442,148, pada tahun 1988 sebesar US\$ 481,713, pada tahun 2016 sebesar US\$ 3,570,285. Namun, pada tingkat ASEAN pendapatan per kapita Indonesia menjadi terendah ke-5 dan masih lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Brunei Darusalam, Malaysia, dan Thailand serta Indonesia masih tergolong negara berpendapatan menengah tinggi karena nilai pendapatan per kapita Indonesia masih kurang dari US\$ 9.386 (World Bank, 2017).

Aktivitas perdagangan internasional yang berupa aktivitas ekspor impor di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Keterbukaan ekonomi yang berupa kegiatan ekspor impor sangat bermanfaat bagi setiap negara karena dapat

meningkatkan pendapatan nasional negara. Hal ini dilandasi oleh meningkatnya daya saing negara serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap suatu negara maka dapat mendorong perdagangan internasional yang lebih baik. Selain itu, perdagangan internasional dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara karena adanya keuntungan dari banyaknya produk lokal yang terjual ke luar negeri (Hasoloan, 2013). Disisi lain, aktivitas perdagangan internasional atau keterbukaan ekonomi yang meningkat dapat berdampak positif maupun negatif pada adanya korupsi. Menurut Ades dan Di Tella, 1999 mengungkapkan terdapat hubungan positif antara keterbukaan ekonomi dari sisi perdagangan internasional dan korupsi, keterbukaan ekonomi cenderung menutup kesempatan untuk korupsi sebab keterbukaan ekonomi cenderung membuat pasar dapat lebih insentif serta mengurangi kekuatan monopoli produsen. Selain itu, menurut Bhagwati, 1982, mengemukakan bahwa semakin tinggi keterbukaan ekonomi maka dapat mengurangi tingkat korupsi sebab adanya batasan perdagangan internasional seperti tarif dan kuota memberikan peluang kepada pejabat publik untuk melakukan korupsi dengan mencari rente. Sedangkan menurut Gerring dan Thacker, 2005 yang berpendapat bahwa terdapat hubungan negatif antara keterbukaan ekonomi dan korupsi. Berikut merupakan perkembangan keterbukaan ekonomi di Indonesia tahun 1985 sampai tahun 2016:



Gambar 1.3: Keterbukaan Ekonomi Indonesia Tahun 1985 - 2016

Sumber: World Bank 2017

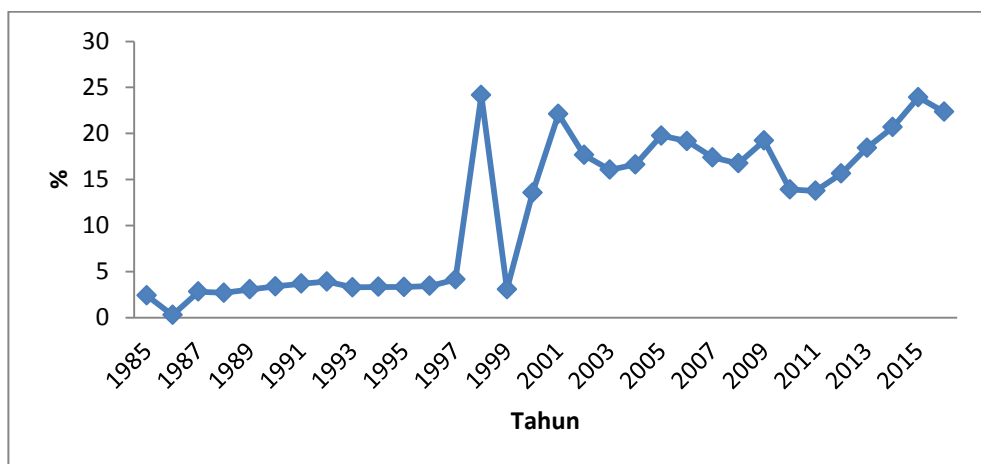
Berdasarkan tabel 1.3, menunjukkan data nilai keterbukaan ekonomi Indonesia tahun 1985 - 2016. Nilai keterbukaan ekonomi Indonesia berfluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 1985 nilai keterbukaan ekonomi Indonesia sebesar 23.778%. Pada tahun 1986 sebesar 20.496%. Pada tahun 1987 sebesar 24.577%. Pada tahun 1988 sebesar 25.042%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 19.089%. Penurunan tersebut mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit.

Defisit neraca perdagangan disebabkan salah satunya akibat dari melemahnya permintaan dunia yang merupakan akibat dari adanya krisis finansial di kawasan Eropa serta belum stabilnya perekonomian Amerika Serikat. Defisit neraca perdagangan pada tahun 2012 tercatat sebesar 1,7 miliar dollar AS dengan nilai ekspor sebesar 190 miliar dollar AS sedangkan nilai impor sebesar 191,7 miliar dollar

AS. Pada tahun 2013 tercatat sebesar 4,1 miliar dollar AS dengan nilai ekspor sebesar 182,6 miliar dollar AS sedangkan nilai impor sebesar 186,6 miliar dollar AS. Pada tahun 2014 tercatat sebesar 2,1 miliar dollar AS dengan nilai ekspor sebesar 161,7 miliar dollar AS sedangkan nilai impor sebesar 163,7 miliar dollar AS sampai pada tahun 2016 nilai ekspor Indonesia mulai menunjukkan keadaan yang baik yaitu mengalami peningkatan sebesar 1,99% (BI, 2017).

Pendapatan per kapita Indonesia mengalami peningkatan. Namun keterbukaan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Sedangkan disisi lain pengeluaran pemerintah di sektor publik seperti pengeluaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan. Pentingnya aspek pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat menyebabkan pemerintah meningkatkan anggaran publik untuk pembangunan pada kedua sektor tersebut. Kualitas pendidikan dan kesehatan yang tinggi dapat menciptakan sumber daya manusia yang baik pula. Melalui pendidikan dan kesehatan yang baik pemerintah dapat memutus siklus kemiskinan. Kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, disisi lain anggaran sektor publik yang meningkat dapat berdampak positif maupun negatif terhadap adanya korupsi. Korupsi di sektor kesehatan sepanjang tahun 2016 tercatat sebanyak 96 tindak korupsi. Sebagian besar kasus korupsi tersebut disebabkan karena adanya penerapan dana jaminan kesehatan BPJS dan dana jaminan lainnya. Kasus korupsi di sektor kesehatan di dominasi oleh kasus pada dana jaminan kesehatan dengan jumlah kasus 107 kasus dan negara mengalami kerugian

sebesar 543.1 miliar rupiah. Sedangkan kasus korupsi di sektor pendidikan sepanjang tahun 2016 tercatat sejumlah 425 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 618 tersangka dan negara mengalami kerugian sebesar 1,3 triliun rupiah. Objek yang menjadi sasaran untuk dikorupsi dalam sektor pendidikan mencakup sarana dan prasarana sekolah, dana bantuan pendidikan seperti dana BOS, dan infrastruktur sekolah (Indonesia Corruption Watch, 2017). Menurut Hariyani, (2016) mengemukakan bahwa anggaran sektor publik berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi yaitu semakin tinggi anggaran sektor publik maka tingkat korupsi juga akan meningkat. Hal ini terjadi sebab tingginya pengeluaran pemerintah untuk sektor publik dapat dijadikan kesempatan oleh pejabat publik untuk mencari rente. Selain itu, adanya keterlibatan pemerintah secara penuh maka dapat menyebabkan terjadi monopoli dan mencegah terjadinya kompetisi terbuka dan adil bagi para pelaku usaha yang selanjutnya dapat menimbulkan adanya kesempatan untuk melakukan korupsi (Elliot, 1997).



Gambar 1.4: Anggaran Publik Indonesia Tahun 1985- 2016

Sumber: Kementerian Keuangan, 2017

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan nilai anggaran publik Indonesia, dapat dilihat bahwa anggaran sektor publik Indonesia cukup berfluktuatif dan cenderung meningkat. Tahun 1985 anggaran sektor publik terhadap PDB sebesar 2,411%. Anggaran sektor publik tahun 1986 sebesar 0,288%. Pada tahun 1987 anggaran sektor publik sebesar 2,831%. Pada tahun 1988 anggaran sektor publik Indonesia sebesar 2,703, hingga tahun 2016 anggaran sektor publik Indonesia mengalami peningkatan menjadi sebesar 22,343. Peningkatan pada anggaran sektor publik Indonesia menandakan bahwa pemerintah mulai meningkatkan pembangunan dan kualitas barang publik khususnya pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Alokasi anggaran pendidikan yaitu sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja negara, anggaran pendidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 353,4 miliar, pada tahun 2015 sebesar 390,1 miliar sampai tahun 2016 sebesar 416,6 miliar. Anggaran pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi, serta daya saing. Sedangkan alokasi anggaran kesehatan 5% dari belanja negara. Anggaran kesehatan pada tahun 2014 sebesar 59,7 miliar, pada tahun 2015 sebesar 65,9 miliar, sampai pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 92,3 miliar. Anggaran kesehatan dicapai dengan menciptakan kualitas fasilitas kesehatan yang memadai serta memfokuskan pada program kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Kemenkeu, 2017). Namun, apabila peningkatan pada anggaran publik khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan tidak diimbangi

dengan kualitas kelembagan dan peraturan yang tinggi dapat memicu kesempatan berkorupsi.

Penting untuk menganalisis faktor – faktor yang dapat menentukan korupsi, sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan kebijakan pemberantasan korupsi di suatu negara. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis beberapa variabel yaitu variabel pendapatan per kapita, keterbukaan ekonomi, dan anggaran publik. Dengan menganalisis variabel – variabel tersebut, akan dilihat pengaruhnya terhadap tingkat korupsi, sehingga hasil dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai upaya dalam pengambilan kebijakan memberantas korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan. Namun, jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Akibatnya pendapatan per kapita Indonesia mengalami sedikit peningkatan dan lebih rendah ke-5 di tingkat ASEAN. Selain itu, keterbukaan ekonomi Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan karena perdagangan internasional Indonesia masih didominasi oleh impor. Sedangkan nilai ekspor hanya mengalami peningkatan sedikit sehingga angka keterbukaan ekonomi Indonesia cenderung turun dan beberapa tahun terakhir neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Disisi lain, tingkat korupsi Indonesia masih tinggi dilihat dari peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah dan di bawah negara Singapura, Malaysia, Thailand. Indonesia hanya unggul dari negara Filipina,

Vietnam, dan Laos, yang mana hal ini menandakan bahwa tingkat korupsi Indonesia masih tergolong tinggi. Selain itu, kasus korupsi di Indonesia meningkat dan tersebar di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan per kapita terhadap tingkat korupsi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap tingkat korupsi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh anggaran publik terhadap tingkat korupsi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan per kapita terhadap tingkat korupsi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Menganalisis pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap tingkat korupsi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Menganalisis pengaruh anggaran publik terhadap tingkat korupsi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor - faktor yang dapat berpengaruh terhadap korupsi di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan masukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan korupsi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai referensi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan korupsi untuk memberantas korupsi sampai keakar – akarnya.

1.5 Orisinalitas

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu bahwa penelitian ini secara khusus meneliti tingkat korupsi di Indonesia dengan data *time series*. Data indeks persepsi korupsi yang digunakan bersumber dari *international country risk guide* yang mana pada penelitian terdahulu tidak ada yang secara khusus menggunakan data *time series*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendapatan per kapita, keterbukaan ekonomi, dan anggaran publik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Game Theory

Teori permainan (*Game theory*) pertama kali dilaksanakan oleh Antoine Cournot yang mempelajari tentang duopoli pada tahun 1838, yang selanjutnya teori ini dikembangkan oleh seorang ahli Matematika Perancis yang bernama Emile Borel pada tahun 1921. Selanjutnya pada tahun 1944 teori permainan ini dikembangkan oleh John Von Neumann dan Oskar Morgenstern untuk menganalisis perilaku ekonomi terutama dalam persaingan bisnis melalui karya ilmiahnya yang berjudul *theory of games and economic behavior*. Teori permainan (*game theory*) merupakan suatu metode matematis yang digunakan sebagai perumusan persaingan atau konflik antara berbagai kepentingan, yang mana teori ini dikembangkan untuk melakukan suatu analisis dalam proses pengambilan keputusan dari situasi – situasi persaingan yang berbeda serta melibatkan dua atau lebih kepentingan. *Game theory* merupakan suatu studi yang berkenaan dengan tingkah laku agen atau Pemain dalam proses mengambil keputusan, yang mana keputusan yang diambil oleh satu seorang pemain akan mempengaruhi dari keputusan pemain lainnya. Setiap pemain atau agen yang terlibat dalam persaingan tersebut mempunyai pemikiran rasional dan logis.

Berdasarkan teori permainan ini setiap pemain atau agen memiliki strategi yang akan digunakan oleh masing – masing agen guna untuk memperoleh keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh oleh setiap agen atau pemain dapat dilihat dari *pay off* strategi masing – masing pemain. *Pay off* merupakan ukuran seberapa bagus setiap pemain dalam melakukan strateginya dalam permainan. *Pay off* disajikan dalam sebuah matriks yang disebut sebagai matriks *pay off* (Charmichael, 2013 dalam Saifuddin, 2018).

Teori permainan ini merupakan interaksi dari strategi yang ditetapkan oleh para pemain atau agen. Pada kehidupan nyata interaksi para pemain ini seperti penegak hukum dan pelaku tindak kejahatan korupsi. Pada teori ini penegak hukum akan melihat bagaimana strategi yang akan ditempuh oleh pelaku kejahatan dan sebaliknya pelaku kejahatan juga akan melihat bagaimana strategi yang akan diambil oleh penegak hukum, sehingga akan diperoleh keputusan dari kedua pelaku tersebut. Menurut Pradipto (2009) mengemukakan bahwa hubungan *pay off* dari kedua pelaku tersebut dapat disajikan dalam matriks yang diformulasikan dari hubungan *pay off* menurut Tsebelis tahun 1968.

Tabel 2.1

Matriks *Pay Off* Dari Teori Permainan Oleh Tsebelis Tahun 1968

		Polisi	
		Patroli	Tidak Patroli
Masyarakat	Melanggar	e1, e2	f1, f2
	Tidak Melanggar	g1,g2	h1, h2

Sumber: Pradipto, 2009

Dimana $g1 > e1$, $f1 > h1$, $e2 > f2$, dan $h2 > g2$

Pada tabel 2.1 menunjukkan matriks *pay off* oleh Tsebelis tahun 1968, *Pay Off* yang diperoleh para pelaku kejahatan yaitu (e_1, f_1, g_1, h_1). Sedangkan *Pay Off* yang didapatkan oleh polisi adalah (e_2, f_2, g_2, h_2). Pada tabel tersebut akan terjadi empat kemungkinan yaitu masyarakat melanggar maka polisi berpatroli, masyarakat melanggar dan polisi tidak berpatroli, masyarakat patuh terhadap peraturan dan polisi berpatroli, masyarakat patuh terhadap peraturan dan polisi tidak berpatroli. Hubungan *Pay Off* antara kedua pelaku tersebut adalah apabila masyarakat melakukan pelanggaran maka sebaiknya polisi melakukan patroli, jika masyarakat dapat mematuhi peraturan maka sebaiknya polisi tidak berpatroli karena apabila polisi melaksanakan patroli hanya akan memakan biaya dan waktu yang banyak, ketika polisi berpatroli maka masyarakat akan lebih memilih untuk patuh terhadap peraturan. Saat polisi tidak melaksanakan patroli, masyarakat akan lebih senang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini tidak ada strategi antar pelaku yang sukses yang ada hanyalah strategi campuran dari kedua pelaku yang akan mengakibatkan jumlah pelanggaran akan sedikit berkurang (Pradiptyo, 2007).

Selanjutnya menurut Tsebelis mengemukakan bahwa apabila hukuman bagi para pelanggar ditambah maka akibatnya bagi hubungan *Pay Off* adalah sebagai berikut e_1, e_1 menjadi e_1', e_1' dan $e_1' > g_1$. Hal ini juga terjadi apabila pemerintah meningkatkan pencegahan terhadap kriminalitas, dengan menempuh program pencegahan kriminal maka dampaknya bagi hubungan *Pay Off* adalah sebagai berikut h_1, h_1 menjadi h_1', d_1' dan $h_1' > g_1$. Namun, kedua penetapan kebijakan

tersebut menyebabkan peluang polisi dalam melaksanakan patroli menurun. Sedangkan kecenderungan individu dalam melakukan kejahatan tidak berubah. Hasil teori permainan oleh Tsebelis lebih mengarahkan pada bagaimana permainan itu dilaksanakan bukan bagaimana implikasi nyata dari permainan tersebut. Dengan demikian teori permainan Tsebelis menjadi kontroversial dan berlawanan, sehingga menuai banyak kritik. Kemudian teori permainan oleh Tsebelis ini diformulasikan kembali oleh Pradiptyo.

Tabel 2.2

Matriks *Pay Off* Oleh Pradiptyo

		Polisi	
		Patroli	Tidak Patroli
Masyarakat	Melanggar	$U_O - U_D, B_E - C_E - C_S$	$U_O + U_R, 0$
	Tidak Melanggar	$U_R, B_R - C_E$	U_R, B_R

Sumber: Pradiptyo, 2009

Maka probabilitas keseimbangan yang terjadi adalah sebagai berikut:

$$p^* = \frac{C_E}{B_E - C_S} \quad \text{dan} \quad q^* = \frac{U_O}{U_D + U_R}$$

Keterangan:

U_O = keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan.

U_D = keuntungan negatif dari pemberian hukuman langsung seperti penjara, denda, dan pelayanan masyarakat.

U_R = dampak reputasi positif dari masyarakat yang tidak menjadi terdakwa

B_E = keuntungan dari penegakan hukum termasuk pendeteksian kejadian dan efek jera yang timbul dalam penegakan hukum

B_R = manfaat reputasi yang diperoleh dalam pencapaian tujuan yang ditentukan oleh otoritas penegak hukum

C_E = biaya penegakan hukum termasuk biaya investigasi dan biaya petugas polisi dalam menegakkan hukum di area tertentu

C_S = biaya pelaksanaan pengadilan termasuk hukuman langsung maupun tidak langsung

Berdasarkan tabel 2.2 matriks *pay off* menurut Tsebelis disempurnakan lagi oleh Pradiptyo karena teori permainan menurut Tsebelis menghasilkan hasil yang kontroversial dan berlawanan, sehingga dengan disempurnakan lagi akan terhindar dari hasil yang berlawanan. Hasil dari teori permainan menurut Pradiptyo adalah langkah apapun yang diambil mengakibatkan hukuman dapat mengurangi peluang dari tindak kejahatan. Selain itu, menurut Pradiptyo, (2009) menyatakan bahwa mencegah tindakan kriminal akan lebih baik dibandingkan dengan strategi peningkatan hukuman. Hal ini terjadi sebab strategi pencegahan kriminal memiliki peluang yang lebih besar terhadap pengurangan terjadinya kejahatan dibandingkan strategi peningkatan hukuman karena dalam peningkatan hukuman membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak.

2.1.2 Teori Korupsi

Menurut (Transparency International, 2017), korupsi di sektor publik umumnya diartikan sebagai suatu penyelewengan terhadap jabatan publik untuk memperkaya diri sendiri. Menurut USAID (2017) mendefinisikan korupsi merupakan suatu penyelewengan unilateral oleh pejabat publik atau pemerintahan seperti nepotisme, serta pelanggaran yang menghubungkan sektor publik dengan sektor privat seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh penajakan dan penipuan. Menurut Gibbons (1999 dalam Seto, 2012) menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk korupsi antara lain: patronase politik; money politik; pork-barreling; penyuapan untuk mempermudah kepentingan; graftifikasi,; nepotisme; dan korupsi untuk kepentingan kelompok.

Tingkat korupsi yang tinggi di suatu Negara dapat mengakibatkan kinerja politik, sosial dan ekonomi Negara tersebut menjadi tidak kondusif karena banyaknya kerugian yang dihasilkan dari adanya korupsi seperti penegakkan hukum yang rendah dapat memicu tindak kriminalitas, keuangan Negara menjadi tidak stabil, pembangunan tidak merata.

a. Teori *Willingness And Opportunity*

Korupsi terjadi apabila terdapat kemauan dan kesempatan. Kemauan (*willingness to corrupt*) merupakan faktor internal, serta kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi (*opportunity to corrupt*) merupakan faktor eksternal. Jika kedua hal tersebut bertemu maka akan menyebabkan tindakan korupsi (Wijayanto, 2009). Manusia yang berpikir rasional memiliki sifat akan

memaksimalkan keuntungan yang diperoleh yang kemungkinan sifat ini juga menimbulkan sifat ingin menang sendiri serta mementingkan diri sendiri (*selfish*). Disamping itu, manusia dalam menjalankan kehidupannya dipengaruhi oleh moral yang dimiliki. Apabila dalam memaksimalkan manfaat yang diperoleh tidak diiringi dengan moral yang baik maka dapat mengakibatkan terjadinya tindak korupsi.

Korupsi dapat terjadi karena adanya kesempatan, kesempatan merupakan faktor eksternal yang dapat menimbulkan tindak korupsi. Dimana *opportunity* ini sangat tergantung dengan kondisi sistem yang ada. Apabila kondisi sistem yang ada lemah maka dapat menimbulkan banyak kesempatan untuk berkorupsi. Namun hal ini dipengaruhi juga oleh moral manusia. Begitupun sebaliknya, apabila sistem sudah tertata dengan baik tetapi moral manusia masih tidak baik maka dapat menimbulkan tercipta korupsi.

2.1.3 Pendapatan Per Kapita

1. Definisi Pendapatan Per Kapita

Perhitungan pendapatan nasional akan memberikan gambaran kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk negara tersebut. Hasil dari pembagian tersebut dikenal dengan angka pendapatan per kapita. *World Bank* menggunakan pendapatan nasional bruto (PNB) untuk menghitung pendapatan per kapita. PNB digunakan dalam perhitungan pendapatan per kapita sebab hanya menghitung nilai tambah pendapatan warga negara baik yang di dalam maupun di luar negeri, sehingga hal ini lebih mempresentasikan pendapatan warga negara yang

sesungguhnya. Dengan demikian rumus dari pendapatan per kapita adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Per Kapita} = \frac{PNB}{\text{Jumlah Penduduk}} \quad (2.1)$$

Semakin tinggi angka pendapatan per kapita, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dianggap semakin tinggi. Perhitungan pendapatan per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat. Ukuran tingkat kesejahteraan yang biasanya digunakan adalah tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan gizi, dan jaminan masa depan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Apabila tingkat pendapatan per kapita tinggi maka dapat meningkatkan daya beli masyarakat, kesempatan memperoleh kesehatan dan pendidikan yang baik juga meningkat. Namun, hal tersebut dapat terjadi apabila kenaikan pendapatan per kapita diiringi dengan perbaikan sistem kelembagaan serta pemerataan distribusi pendapatan (Prasetyo, 2011).

2. Teori Pendapatan Nasional

Menurut Sukirno, 1985 mendefinisikan pendapatan nasional adalah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode satu tahun. Terdapat 3 metode dalam menghitung pendapatan nasional. Yaitu: (1) pendekatan produksi, (2) pendekatan pengeluaran, dan (3) pendekatan pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan produksi menghitung nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada dalam suatu negara baik yang dimiliki oleh warga negara itu maupun warga negara asing. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, yaitu menghitung *value added* yang dihasilkan dikalikan dengan tingkat harga yang berlaku. Angka perhitungan dengan pendekatan produksi dikenal sebagai GDP nominal atau GNP nominal. Perhitungan dengan pendekatan produksi sering terjadi *double accounting* (perhitungan ganda). Untuk menghindari adanya *double accounting* maka perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: menghitung nilai akhir atau dengan menambahkan nilai tambah. Dengan asumsi, nilai akhir suatu barang adalah nilai barang dan jasa yang benar – benar siap dikonsumsi oleh konsumen akhir. Dengan demikian, rumus perhitungan pendekatan produksi adalah sebagai berikut:

$$PN = \sum_{i=1}^n NT \quad (2.2)$$

Dimana:

PN = Pendapatan Nasional

i = sektor produksi ke 1,2,3,..., n

NT = nilai tambah (NT = nilai output – nilai input antara)

- b. Pendekatan pendapatan yaitu perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi dari aktivitas kegiatan ekonominya dalam suatu negara pada waktu tertentu.

Pendapatan tersebut adalah diperoleh dari faktor produksi yang digunakan seperti tanah, tenaga kerja, gedung, modal, dan keahlian kewirausahaan. Dengan demikian, pendapatan nasional dapat berupa: sewa, bunga, upah atau gaji, deviden dan laba perusahaan. Angka yang diperoleh dalam perhitungan dengan pendekatan pendapatan ini menunjukkan besarnya pendapatan nasional. Berikut rumus perhitungan pendekatan pendapatan yaitu:

$$PN = R + W + I + P + (s-t) + N_{fp} \quad (2.3)$$

Dimana:

PN = Pendapatan nasional

R = Rent (Sewa)

W = Wages (upah)

I = Interest (Tingkat Bunga)

P = Profit (Keuntungan)

(s-t) = Subsidi Dan Pajak Tidak Langsung

N_{fp} = Pembayaran Faktor Produksi Ke Luar Negeri.

- c. Perhitungan dengan pendekatan pengeluaran yaitu perhitungan pendapatan nasional yang dilakukan dengan cara menghitung seluruh pengeluaran masyarakat dalam suatu negara. Pengeluaran masyarakat dalam suatu negara yang dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam: sektor pengeluaran rumah tangga (C), sektor perusahaan (I), serta sektor pemerintah (G) dan sektor luar negeri (X-M). Jika ditulis persamaanya adalah sebagai berikut:

$$PN = C + I + G + (X - M) \quad (2.4)$$

Dimana:

PN = Pendapatan Nasional

C = konsumsi

I = investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

I = Impor

2.1.4 Keterbukaan Ekonomi

1. Pengertian Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi dari sisi perdagangan merupakan rasio ekspor impor terhadap PDB. Setiap negara di dunia melaksanakan kegiatan perdagangan internasional seperti kegiatan ekspor dan impor. Hal ini, didorong oleh kebutuhan yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adanya keterbatasan kemampuan negara untuk memproduksi seluruh kebutuhan di negaranya sendiri tersebut maka setiap negara harus melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Selain itu, adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki juga menjadi alasan setiap negara harus melakukan kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional dari sisi perdagangan yaitu aktivitas ekspor impor dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak negara yang melakukan aktivitas perdagangan tersebut. Perekonomian

negara akan meningkat seiring dengan peningkatan perdagangan internasional. Neraca perdagangan akan mengalami surplus serta likuiditas negara meningkat. Ketersediaan dana publik untuk pembiayaan publik meningkat yang selanjutnya meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Perdagangan Internasional

Gagasan mengenai perdagangan internasional sudah ada sejak zaman klasik Adam Smith mengemukakan bahwa “pembagian tenaga kerja dibatasi oleh besarnya pasar (Todaro & Smith, 2006: 81). Salah satunya teori perdagangan internasional yaitu teori keunggulan komparatif David Ricardo muncul sebagai penyempurnaan teori keunggulan mutlak Adam Smith. David Ricardo mengungkapkan bahwa yang menentukan tingkat keuntungan dalam perdagangan internasional bukan berasal dari keunggulan mutlak melainkan dari keunggulan komparatif. Menurut (Boediono 1997: 22) menjelaskan bahwa suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak pun bisa melakukan ekspor selama negara tersebut memiliki harga relatif dalam negeri yang lebih tinggi dibanding negara lain (keunggulan komparatif).

Setiap Negara harus mampu melakukan spesialisasi produksi untuk menghasilkan produk yang unggulan secara komparatif sehingga dapat menciptakan perdagangan bebas yang efektif dan tanpa hambatan, serta dapat menciptakan harga keseimbangan yang relatif dan dapat memberikan keuntungan pada kedua belah pihak yang saling bekerjasama, sehingga hal ini dapat menggeser Kurva Kemungkinan Konsumsi (*Consumption Possibility Frontier* atau CPF) ke kanan yang berarti bahwa kemampuan konsumsi barang- barang produksi dari negara tersebut

mengalami peningkatan. Dalam hal ini maka tingkat konsumsi suatu negara akan berbeda dengan tingkat produksi. Akan tetapi, bisa meningkat lebih tinggi dari tingkat produksi negara tersebut, sehingga, tingkat produksi dunia akan meningkat dan dapat menjamin kemakmuran masyarakat.

2.1.5 Anggaran Publik

Sektor publik merupakan suatu wadah bagi pemerintah untuk menyediakan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Konsep anggaran publik dalam penelitian ini adalah konsep anggaran sektor publik, yang mana anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan dan tersusun atas pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam menyediakan kebutuhan publik bagi masyarakat seperti kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan serta lain sebagainya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo, 2009 mengungkapkan bahwa anggaran sektor publik sangat penting untuk direncanakan karena beberapa alasan berikut:

1. Anggaran merupakan suatu alat bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, politik yang berkesinambungan untuk menjamin kehidupan masyarakat yang lebih baik dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade offs*.
3. Anggaran disusun untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat.

Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolok ukur setiap aktivitas yang akan dilakukan oleh pemerintah, sehingga setiap aktivitas atau kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan terkontrol dengan baik. Dalam hal ini, agar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dapat terwujud dengan baik serta dapat memenuhi kebutuhan publik maka perlu direncanakan dalam anggaran sektor publik.

2.2 Hubungan Pendapatan Per Kapita Dan Tingkat Korupsi

Perencanaan pembangunan Indonesia dilaksanakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah suatu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita merupakan indikator penting untuk melihat kondisi sosial ekonomi negara. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitupun sebaliknya semakin rendah nilai pendapatan per kapitanya maka semakin kecil tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Upaya meningkatkan pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pemerataan

pendapatan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif dan masyarakat dapat menjalankan kehidupan yang produktif.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu ukuran yang ingin dicapai oleh suatu negara. Perubahan struktur ekonomi yang selanjutnya dapat menekan tingginya tingkat kemiskinan serta pengangguran guna untuk meningkatkan pemerataan, dimana harus diimbangi dengan perbaikan sistem kelembagaan. Perbaikan sistem kelembagaan dari segi ekonomi, politik, sosial budaya yang dapat ditinjau dari adanya perbaikan pada aspek aturan main baik formal maupun informal dan aspek organisasi yang menjalankan aturan main tersebut. Hal tersebut dapat mendukung kelancaran dalam mewujudkan tujuan negara yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada umumnya pembangunan ekonomi yang semakin baik dapat mendorong meningkatnya pemerataan pendapatan serta dapat mengurangi kesenjangan antar masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi yang ada dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga mengurangi adanya kecemburuan sosial dan adanya konflik atau kejahatan nasional. Kematangan sistem kelembagaan dalam menjalankan aturan mainnya juga dapat mendukung seluruh kinerja ekonomi, termasuk dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Namun, apabila pemegang aturan main tidak menjalankan tugasnya dengan baik yang terjadi justru hanya akan menimbulkan kejahatan nasional yang dapat berdampak pada kerugian negara sebab pembangunan yang terjadi hanya dinikmati oleh beberapa orang saja.

Hubungan pendapatan per kapita dengan korupsi yakni, negara dengan pendapatan per kapita tinggi mencerminkan pemerataan pendapatan yang tinggi pula sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan negara dengan pendapatan per kapita rendah cenderung memiliki pemerataan pendapatan yang rendah dan kemakmuran masyarakat juga rendah, yang mana semakin makmur dan tingginya standar hidup suatu negara dapat mengurangi korupsi (Goel & Nelson, 2005). Selain itu, bahwa negara dengan perekonomian yang baik atau negara yang maju cenderung memiliki tingkat korupsi yang rendah. Sebaliknya, negara dengan perekonomian yang rendah atau negara berkembang secara ekonomi memiliki tingkat korupsi yang tinggi (Treisman, 2000).

2.3 Hubungan Keterbukaan Ekonomi Dan Tingkat Korupsi

Keterbukaan ekonomi dari sisi perdagangan merupakan rasio ekspor impor terhadap PDB. Ekspor impor merupakan indikator penting dalam perekonomian negara. Kegiatan perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan nasional yang dapat dilihat dari perkembangan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, perkembangan ekspor impor juga dapat mempengaruhi neraca perdagangan. Pendapatan nasional yang semakin meningkat ditandai oleh meningkatnya ekspor lebih besar dibandingkan impor serta pendapatan nasional yang menurun ditandai oleh semakin menurunnya nilai ekspor. Setiap negara berupaya untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya yang mana dapat mencegah terjadinya defisit pada neraca perdagangan. Meningkatnya perdagangan internasional suatu negara dapat

meningkatkan perluasan pasar serta mendorong adanya transfer teknologi, sehingga dalam hal ini keterbukaan ekonomi negara juga meningkat.

Hubungan keterbukaan ekonomi dan korupsi bahwa keterbukaan ekonomi dapat berdampak negatif maupun positif terhadap korupsi. Keterbukaan ekonomi dari sisi perdagangan cenderung menutup kemungkinan adanya kesempatan untuk korupsi sebab keterbukaan ekonomi cenderung mengintensifkan pasar dan mengurangi kekuatan monopoli produsen sehingga produsen tidak dapat mencari rente (Ades dan Di Tella, 1999). Selain itu, menurut Bhagwati, 1982, mengemukakan bahwa semakin tinggi keterbukaan ekonomi maka dapat mengurangi tingkat korupsi sebab adanya batasan perdagangan internasional seperti tarif dan kuota memberikan peluang kepada pejabat publik untuk melakukan korupsi dengan mencari rente. Sedangkan menurut Gerring dan Thacker, 2005 yang berpendapat bahwa terdapat hubungan negatif antara keterbukaan ekonomi dan korupsi.

2.4 Hubungan Anggaran Publik Dan Tingkat Korupsi

Anggaran publik merupakan instrumen atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dari dana publik guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang publik (Mardiasmo, 2009). Anggaran publik digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk merencanakan dan merumuskan berbagai kebijakan program, aktivitas, alokasi dana dari kegiatan agar dapat lebih terarah dan terkontrol dengan baik. Tujuan dari merencanakan anggaran pada sektor publik yaitu agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat

memenuhi kebutuhan publik dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Setiap negara mempunyai wewenang untuk meningkatkan pembangunan ekonominya melalui menciptakan kualitas kebutuhan publik yang memadai. Peningkatan pembangunan ekonomi dapat tercipta dengan meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan kualitas barang publik lainnya. Selanjutnya, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas meningkat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah menentukan kebijakan yang dapat mendorong perekonomian serta untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, terkadang dalam prakteknya kebijakan yang dibuat hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Masih banyak pejabat publik yang tidak bekerja sesuai dengan tanggungjawabnya dan merugikan negara. Maka hal ini mengakibatkan kebijakan yang ada tidak mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat semakin tidak terjamin.

Anggaran publik dan korupsi memiliki hubungan positif maupun negatif. Anggaran publik dapat berpengaruh positif maupun negatif pada tingkat korupsi. Menurut Hariyani, 2016 mengemukakan bahwa anggaran sektor publik berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi yaitu semakin tinggi anggaran sektor publik maka tingkat korupsi juga akan meningkat. Hal ini terjadi sebab tingginya pengeluaran pemerintah untuk sektor publik dapat dijadikan kesempatan oleh pejabat publik untuk mencari rente. Selain itu, adanya keterlibatan pemerintah secara penuh maka dapat

menyebabkan terjadi monopoli dan mencegah terjadinya kompetisi terbuka dan adil bagi para pelaku usaha yang selanjutnya dapat menimbulkan adanya kesempatan untuk melakukan korupsi (Elliot, 1997).

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

Nama Dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
Happy Febrina Hariyani, 2016	Korupsi : Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Asia Pasifik	Tingkat korupsi, indeks demokrasi, stabilitas ekonomi, keterbukaan ekonomi, <i>public budget</i> , kualitas regulasi, <i>urban population</i> , variabel <i>dummy</i>	Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan tingkat korupsi di 17 negara di kawasan asia pasifik yaitu faktor ekonomi, sosial dan politik faktor ekonomi : keterbukaan ekonomi berpengaruh nrgatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, anggaran sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi Faktor sosial: <i>urban population</i> berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat

			<p>korupsi, kualitas regulasi tidak signifikan terhadap tingkat korupsi.</p> <p>Faktor politik: stabilitas politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, demokrasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi.</p>
Tantri bararoh dan Budi prayitno, 2011	<p>Analisis Faktor Transparansi Pemerintah Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Yang Mempengaruhi Korupsi Di Kabupaten Dan Kotamadya Di Indonesia</p>	<p>Tingkat korupsi, transparansi pemerintah, tingkat pendidikan masyarakat</p>	<p>Transparansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di kabupaten dan kota di Indonesia, tingkat pendidikan masyarakat tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.</p>
Nugroho SBM, 2012	<p>Korupsi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia</p>	<p>Tingkat korupsi, GDP, gender, tingkat pendidikan, keterbukaan ekonomi</p>	<p>GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, gender (wanita) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat</p>

			korupsi, dan keterbukaan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi
Mohamed Sami Ben Ali & Amira Gasmi, 2017	Does ICT Diffusion Matter For Corruption? An Economic Development Perspective	Korupsi, inflasi, PDB per kapita, keterbukaan ekonomi, pengguna internet, pengguna ponsel	Penggunaan ponsel dan internet berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi, PDB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, keterbukaan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi.
Srabani saha & Mohamed sami ben ali, 2017	Corruption And Economic Development: New Evidence The Middle Eastern And North African Countries	Korupsi (CPI), PDB Per Kapita, ukuran pemerintah, kebebasan ekonomi, demokrasi, hak – hak politik, pendidikan, pengangguran, ketegangan ukuran etnis	PDB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, kebebasan politik dan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di negara MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara), tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan

			terhadap tingkat korupsi di negara MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara), tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi di negara MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara), ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, demokrasi berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi dan ukuran etnis berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di negara MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara).
--	--	--	---

2.5.1 Perbedaan Dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari Happy, 2016 berjudul Korupsi: Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Asia Pasifik. Persamaan penelitian Happy, 2016 dengan penelitian ini adalah terletak pada Variabel dependen yang digunakan sama yaitu tingkat korupsi dengan ukuran indeks persepsi korupsi (CPI). Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder serta metode analisis data dengan regresi berganda. Sedangkan perbedaan penelitian ini

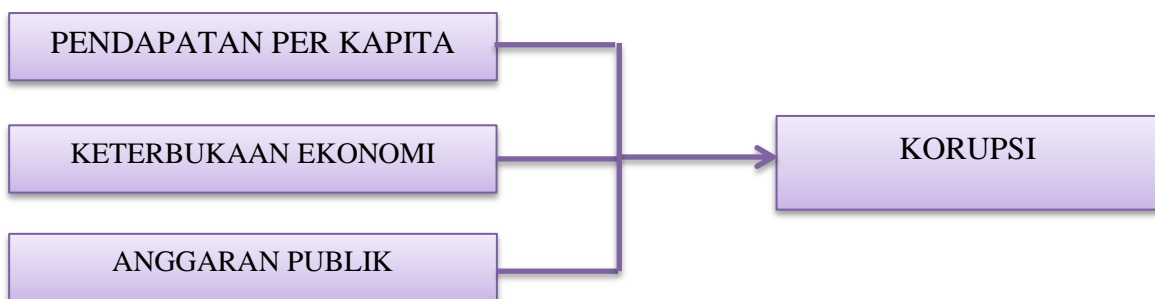
dengan penelitian Happy, 2016 adalah terletak pada variabel independen yang digunakan dalam penelitian, Sampel penelitian dalam penelitian tersebut menggunakan data tahunan 2004-2014 dan 17 negara di Asia Pasifik, Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *Game Theory*, *Willingness And Opportunity*.

2. Penelitian dari Tantri bararoh dan Budi prayitno, 2011 yang berjudul Analisis Faktor Transparansi Pemerintah Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Yang Mempengaruhi Korupsi Di Kabupaten Dan Kotamadya Di Indonesia. Persamaannya meliputi: Variabel dependen yang digunakan sama yaitu tingkat korupsi dengan ukuran indeks persepsi korupsi (CPI). Perbedaannya meliputi: Variabel independen yang digunakan dalam penelitian berbeda, Jenis penelitian tersebut yaitu Explanatory Research dan metode penelitian yaitu Scientific Method, jenis data yaitu data sekunder dan primer, teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Game Theory*, *Willingness And Opportunity*.
3. Penelitian dari Nugroho SBM, 2012 berjudul korupsi dan faktor – faktor yang mempengaruhinya di Indonesia. Persamaannya meliputi: Variabel dependen yang digunakan sama yaitu tingkat korupsi dengan ukuran indeks persepsi korupsi (CPI), jenis penelitian deskriptif kuantitatif, metode analisis data yaitu regresi linear berganda. Perbedaannya meliputi: variabel independen yang digunakan, sampel penelitian dalam penelitian tersebut negara Indonesia dengan data tahunan 1998-2010, teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Game Theory*, *Willingness And Opportunity*.

4. Penelitian dari Mohamed Sami Ben Ali & Amira Gasmi, 2017 berjudul *Does ICT Diffusion Matter For Corruption? An Economic Development Perspective*. Persamaannya meliputi: Variabel dependen yang digunakan sama yaitu tingkat korupsi dengan ukuran indeks persepsi korupsi (CPI), variabel independen yang digunakan sama kecuali variabel anggaran publik, jenis penelitian deskriptif kuantitatif, metode analisis data yaitu regresi linear berganda, jenis data sekunder. Perbedaannya meliputi: teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Game Theory, Willingness And Opportunity*, sampel penelitian dalam penelitian tersebut yaitu 175 negara di dunia dengan periode waktu 1996-2014.
5. Penelitian dari Srabani Saha & Mohamed Sami Ben Ali, 2017 berjudul *Corruption and Economic Development: New Evidence the Middle Eastern and North African Countries*. Persamaannya meliputi: Variabel dependen yang digunakan sama yaitu tingkat korupsi dengan ukuran indeks persepsi korupsi (CPI), Jenis penelitian deskriptif kuantitatif, Jenis data sama yaitu data sekunder, Metode analisis data regresi linear berganda. Perbedaannya meliputi: Variabel independen yang digunakan, sampel penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data panel dengan 16 negara MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara) tahun 1984-2013, Teori utama dalam penelitian ini menggunakan teori *Game Theory, Willingness And Opportunity*.

2.6 Kerangka Berpikir

Fenomena korupsi sudah meluas di berbagai negara di dunia. Korupsi merupakan masalah besar dan sebagian besar negara di dunia baik negara berkembang maupun negara dengan perekonomian yang pesat juga mengalami masalah korupsi. Praktik korupsi yang terjadi juga hampir sama yaitu penggelapan uang, penyogokan, dan penyalahgunaan jabatan. Terdapat beberapa faktor besar yang dapat menyebabkan korupsi diantaranya faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya. Faktor utama penyebab korupsi yaitu faktor ekonomi, yang didasari bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dan kesempatan yang berbeda- beda dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Begitu pula negara bagaimana negara dapat menjamin kualitas pembangunan ekonomi yang baik yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel ekonomi terhadap tingkat korupsi. Indikator ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan per kapita, keterbukaan ekonomi, dan anggaran publik. Berdasarkan permasalahan dan kajian teori di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1: Kerangka Berpikir.

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya lagi. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga pendapatan per kapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia.
2. Diduga keterbukaan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia tahun.
3. Diduga anggaran publik mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain

1. Persamaan jangka pendek:
 - a. Pendapatan per kapita dalam jangka pendek dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Semakin meningkat nilai pendapatan per kapita Indonesia maka dapat meningkatkan nilai CPI yang artinya tingkat korupsi di Indonesia berkurang.
 - b. Keterbukaan ekonomi dalam jangka pendek tidak dapat berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Indonesia.
 - c. Anggaran sektor publik dalam jangka pendek tidak dapat berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Indonesia.
2. Persamaan jangka panjang:
 - a. Pendapatan per kapita dalam jangka panjang dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Semakin meningkat nilai pendapatan per kapita Indonesia maka dapat meningkatkan nilai CPI yang artinya tingkat korupsi di Indonesia berkurang.
 - b. Keterbukaan ekonomi dalam jangka panjang dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Semakin meningkat nilai

keterbukaan ekonomi Indonesia maka mengakibatkan nilai CPI turun yang artinya tingkat korupsi di Indonesia mengalami menurun.

- c. Anggaran publik dalam jangka panjang dapat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Semakin meningkat nilai anggaran publik Indonesia maka dapat menurunkan nilai CPI yang artinya tingkat korupsi Indonesia menurun.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di dapat, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan per kapita dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, sehingga dalam upaya untuk mengurangi tindak korupsi, pemerintah harus mampu meningkatkan kemakmuran negaranya. Pemerintah hendaknya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-job yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita yaitu, dengan mengarahkan kebijakan terutama pada sektor padat karya seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur, mendorong sektor industri yang lebih berorientasi pada padat karya, dan menciptakan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan *skill* kerja. Disamping itu, kualitas penegakan hukum juga harus ditingkatkan agar tercipta kualitas kelembagaan serta mewujudkan prinsip – prinsip *good governance* pada seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

2. Meningkatnya keterbukaan ekonomi dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan ekonomi khususnya dari segi ekspor. Pemerintah hendaknya meningkatkan kualitas barang ekspor Indonesia, mendukung industri- industri yang berorientasi ekspor serta mengurangi tarif pajak ekspor yang selama ini masih memberatkan para pemilik usaha.
3. Meningkatnya anggaran publik dapat meningkatkan tingkat korupsi di Indonesia. Pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran sektor publik, meningkatkan transparansi atas alokasi anggaran pada sektor publik serta meningkatkan kualitas peraturan perundang – undangan terutama dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Rose., & Susan. (1996). *The Political Economy Of Corruption-Causes And Qonsequenses, Public Policy For The Privat Sector*. The World Bank. Washington,DC.
- Ades, Alberto., Tella Di Rafael. (1999). *Rents, Competition, And Corruption*. The American Economic Review, Volume 89 No. 4. Hal 982-993.
- Ali, B, S, M., & Saha, Sharabani. (2017). *Corruption And Economic Development: New Evidence The Middle Eastern And North African Countries*. *Journal Of Economic Analysis And Policy Journal*, Volume 54 Hal 83-95.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Produk Domestik Bruto. <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab1>. (Diakses Tanggal 12 Desember 2018).
- Badan Pusat Statistika. (2017). Penduduk Indonesia Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html>. (Diakses Tanggal 13 Desember 2018).
- Bank Indonesia. (2017). Respons Kebijakan Moneter Di Tengah Krisis Global. <https://www.bi.go.id/perekonomian/>. (Diunduh Tanggal 25 Februari 2019).
- BAPPENAS. (2016). *Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia*. Jakarta.
- Bararoh, Tantri., Prayitno, Budi. (2011). *Analisis Faktor Transparansi Pemerintah Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Yang Mempengaruhi Korupsi Di Kabupaten Dan Kotamadya Di Indonesia*. *Jurnal Equilibrium*, Volume 9 No. 2. Hal 160-180. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Bhagwati, N, Jagdish. (1982). Directly Unproductive, Profit-Seeking (DUP) Activities. *Journal Politic Economi*. Volume 90 No.5. Hal 988-1002
- Boediono. (1997). *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFPE.
- Elliott Ann Kimberly. (1997). *Corruption as an International Policy Problem: Overview and Recommendation*.
- Franciari, Septina Purwiyanti. (2012). Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, Dan Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2008 Dan 2010). *Skripsi*. Semarang : Fakultas Ekonomika Dan Bisnis UNDIP.
- Gerring, John., Thacker.C, Storm. (2005). *Do Neoliberal Politics Deter Political Corruption?*, International Organization. Volume 59. Hal 233-254.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro

- Goel, K. Rajeev., Nelson, A. Michael. (2005). *Economic Freedom Versus Political Freedom: Cross- Country Influences On Corruption*. Economic Papers, Volume 44 No. 2. Hal 121-133. Australia.
- Gujarati, N Damodar., & Porter, C Dawn. (2015a). *Dasar – Dasar Ekonometrika Edisi Lima Buku Satu*. Terjemahan Raden Carlos Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, N Damodar., & Porter, C Dawn. (2015b). *Dasar – Dasar Ekonometrika Edisi Lima Buku Dua*. Terjemahan Raden Carlos Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariyani, Febrina Happy. (2016). *Korupsi: Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Asia Pasifik*. *Tesis*. Bogor: Program Studi Ilmu Ekonomi IPB.
- Hasoloan, Jimmy. (2013). *Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas Dan Perekonomian*. *Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi*, Volume 1 No.2. Hal 102-112. Cirebon: Unswagati.
- Indonesian Corruption Watch. (2017). Laporan Tahunan Tahun 2017. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan%20Akhir%20Tahun%20ICW%202016.pdf>. (Diunduh Tanggal 12 Desember 2018).
- International Country Risk Guide. (2017). The International Country Risk Guide. <https://www.prsgroup.com/explore-our-products/international-country-risk-guide/>. (Diakses Tanggal 24 Juni 2018).
- Junaidi, I Ketut Patra. (2017). *Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Volume 3 No.1. Hal 71-79.
- Kaufmann, Daniel., Aart Kray. (2002). *Growth Without Governance*. Policy Research Working Paper. The World Bank. Hal 1-56.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (1997). *Nota Keuangan Dan RAPBN 1997/1998*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2017). APBN 2017. Jakarta: **Departemen Keuangan Republik Indonesia**.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi>. (Diakses Tanggal 25 Juni 2018).
- Kuncoro, Mudrajat. (2007). *Metode Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mandal, B., & Marjit, S. (2013). *Trade Reform Intermediation And Corruption*. *Journal Of Economic Modeling*, Volume 33 Hal 741-746. India: University Santiniketan..
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Pradiptyo, Rimawan. (2007). *Does Punishment Matter? A Refinement Of The Inspection Game*. *Review Of Law And Economics*, Volume 3 No. 2. Hal 1-23. University Of York.

- Pradiptyo, Rimawan. (2009). *Korupsi Di Indonesia: Perspektif Ilmu Ekonomi*, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Prasetyo, Eko.P. (2011). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Saha, Shrabani., & Ali, Ben Sami Muhamed. (2017). *Corruption And Economic Development: New Evidence From The Middle Eastern And African Countries*. *Journal Economic Analysis Dan Policy*, Volume 54. Hal 83-95.
- Saifuddin, A., N, K, T, Tastrawati., & K, Sari. (2018). *Penerapan Konsep Teori Permainan (Game Theory) Dalam Pemilihan Strategi Kampanye Politik (Studi Kasus: Strategi Pemenangan Pemilukada Dki Jakarta Tahun 2017)*. *Jurnal Matematika*, Volume 7 No.2. Hal 173-179 Denpasar: Universitas Udayana.
- SBM, Nugroho. (2012). *Korupsi Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Di Indonesia*. *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen*, Volume 26 No. 2. Hal 19-33. Semarang: UNDIP.
- Seto, Ario. (2012). *Korupsi, Kesejahteraan Sosial Dan Investasi : Studi Empiris Di Delapan Negara Kawasan Asean Tahun 2000-2009*. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Ekonomi Dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suprayitno, Bambang. (2011). *Desentralisasi Fiskal Dan Korupsi:Fakta Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia*. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Suraji. (2008). *Sejarah Panjang Korupsi Di Indonesia & Upaya Pemberantasannya*. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Volume 12 No. 2. Hal 135-148 Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Todaro, Michael & Stephen Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1, terj. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, P, Michael., & Stephen Smith. (2013). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Sebelas*. Jakarta: Erlangga.
- Transparency, International. (2017). *Corruption Perceptions Index 2017*. <https://www.transparency.org/>. (Diakses tanggal 25 Juni.2018).
- Treisman,D. (2000). *The Causes Of Corruption: A Cross National-Study*. *Journal Public Economic*, Volume 76 No.3. Hal 399-457.
- Treisman,D. (2007). *What Have We Learned About The Causes Of Corruption From Ten Years Of Cross-National Empirical Research?*. *Ann Rev Political Sci*, Volume 10. Hal 211-244.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (2002). Jakarta 4250.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* (2001). Jakarta 4150.
- USAID. (2017). Anti Corruption-Program. <https://www.usaid.gov/id/>. (Diakses Tanggal 12 Juni 2018).
- Widarjoko, P Agus. (2013). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wijayanto. *Memahami Korupsi*, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta:Gramedia.
- World Bank. (2017). Open Data: Indonesia. <https://data.worldbank.org/indicator/>. (Diunduh Tanggal 19 Februari 2019).
- Yugo, Febriyanto. (2016). Analisis Faktor – Faktor Penentu Pendapatan Per Kapita Sebagai Upaya Menghindari Middle Income Trap (Studi Kasus Indonesia). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro.